



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SARINA
NIK : 6107045509720002
Lembaga : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Unit Kerja : FRAKSI PARTAI NASDEM
Sub Unit Kerja : FRAKSI PARTAI NASDEM
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 24 Maret 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : PETRUS
NIK : 6107092506710001
Lembaga : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG
Unit Kerja : FRAKSI DEMOKRASI PERJUANGAN PERSATUAN
INDONESIA
Sub Unit Kerja : FRAKSI DEMOKRASI PERJUANGAN PERSATUAN
INDONESIA
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 20 Maret 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Daftar kekurangan kelengkapan yang harus diisi dan dilengkapi oleh Sdr. MARTINUS KHIU (6107042402680001), ANGGOTA DPRD - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG:

JENIS	URAIAN
Kas	Isian Kas/Setara Kas agar diperbaiki kembali untuk Nilai Saldo Saat Pelaporan.

Keterangan :

1. Jika terdapat kekurangan kelengkapan Surat Kuasa dalam **tabel daftar kekurangan kelengkapan di atas**, mohon Surat Kuasa dicetak melalui aplikasi e-Filing LHKPN dan ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000 oleh setiap nama yg disebutkan dalam uraian dan dikirimkan format aslinya ke alamat :

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih KPK – Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950

2. Bagi yang melaporkan LHKPN dengan menggunakan aplikasi e-Filing LHKPN (*online*) daftar kekurangan (selain surat kuasa) dapat dilengkapi dan diperbaiki melalui melalui elhkpn.kpk.go.id
3. Wajib LHKPN mengirimkan kekurangan dokumen tersebut maksimal 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi oleh Wajib LHKPN. Dalam hal Wajib LHKPN belum menyampaikan dokumen sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Tim Verifikasi KPK